BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN KINERJA 2019

SUBDIREKTORAT FASILITASI PELAKU USAHA

DIREKTORAT
PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Badan Standardisasi Nasional

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha sebagai bagian dari Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha

Nur Hidayati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	1. Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14.000	19.398	100 %
	2. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	150	190	100 %
	1. Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	30	34	100 %
	2. Jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI	100	118	100 %
	3. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mampu menembus pasar ekspor	20	22	100 %
	4. Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha	15	12	80 %
	5. Jumlah Fasilitator Pembina Penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya	40	47	100 %
	Rata-rata capaian			**97 %**

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha ada 6 indikator kinerja yang mencapai target 100% sedangkan 1 indikator kinerja tidak tercapai yaitu untuk indikator kinerja Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI dimana target hanya mencapai 80 % (tercapai 12 panduan dari 15 panduan yang ditargetkan).

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah untuk perbaikan antara lain melanjutkan penyusunan dan pembahasan panduan pembinaan penerapan SNI di tahun 2020.

DAFTAR ISI

Halaman Cover 1
Kata Pengantar 2
Ringkasan Eksekutif 3
Daftar Isi 5
Daftar Gambar 6
Daftar Tabel 7
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang 8
I.2 Maksud dan Tujuan 8
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 9
I.4 Sumber Daya Manusia 10
I.5 Peran Strategis 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis 13
II.1.1 Visi dan Misi 13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran 14
II.2 Perjanjian Kinerja 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja 19
III.2 Realisasi Anggaran 36
BAB IV PENUTUP
Penutup 39

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha.....10

Gambar III.1 Perbandingan jumlah organisasi penerap SNI dari tahun 2016-2019..24

Gambar III.2 : Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam penerapan SNI pertahunnya 26

Gambar III.3 Jumlah UMKM yang dibina dalam Penerapan SNI setiap tahun dari 2015-2019 26

Gambar III.4 : Data komulatif UMKM yang dbina dalam penerapan SNI tahun 2015-2019 27

Gambar III.5 Peta Sebaran pelaku usaha yang dibina dalam penerapan SNI selama tahun 2019 28

Gambar III.6 : Jenis produk yang dbina dalam penerapan SNI di TA 2019.....28

Gambar III.7 : Jumlah Organisasi dan Industri yang dibina dalam penerapan SNI per tahun 29

Gambar III.8 : Data Role Model UMKM penerap SNI setiap tahun dari 2015-2019....32

Gambar III.9 Data Role Model UMKM penerap SNI setiap tahun 32

Gambar III.10 Beberapa produk dari pelaku usaha binaan BSN yang menembus ekspor 34

Gambar III.11 Judul Panduan Penerapan SNI 35

Gambar III.12 Pembina Penerapan SNI yang diberikan capacity building 36

Daftar Tabel

Tabel I.1 Personel ASN Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha 11

Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha.....12

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019.....16

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 17

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019.....20

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sub Direktorat Fasilitasi Pelaku Usaha.....21

Tabel III.3 : Jumlah Organisasi penerap SNI sesuai dengan lingkup sertifikasi KAN ...23

Tabel III.4 Pagu dan Realisasi Anggaran.....

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2019 37

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Standardisasi Nasional, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja unit kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelaku usaha dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang fasilitasi industri, organisasi publik, dan Usaha Mikro Kecil dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi industri, organisasi publik, dan usaha mikro kecil dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
3. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi industri, organisasi publik, dan usaha mikro kecil dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Struktur Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

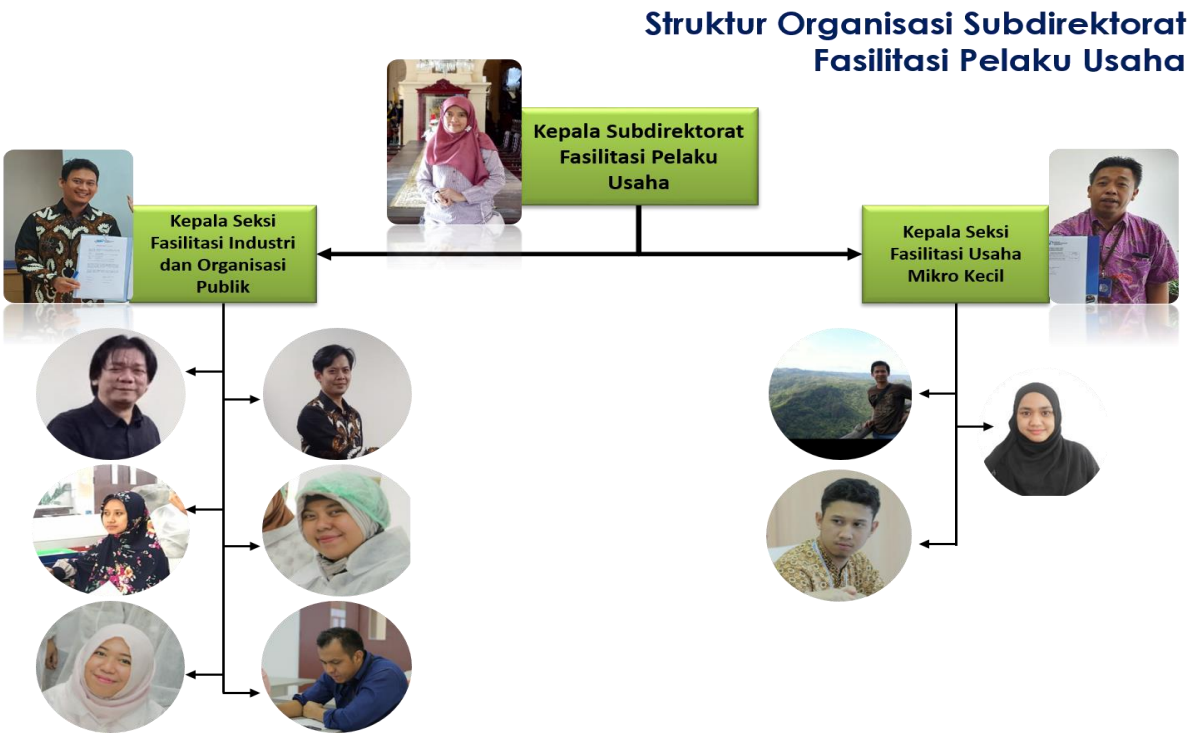

GAMBAR I.1 STRUKTUR ORGANISASI SUBDIREKTORAT FASILITASI PELAKU USAHA

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Seksi Fasilitasi Industri dan Organisasi Publik dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi industri dan organisasi publik dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha mikro kecil dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

TABEL I.1 PERSONEL ASN SUBDIREKTORAT FASILITASI PELAKU USAHA

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha	-	1	-	1
2.	Kepala Seksi Fasilitasi UMKM	-	1	-	1
3.	Kepala Seksie Fasilitasi Industri dan organisasi	-	-	1	1
4.	Staf	1	8	-	9
	Jumlah	**1**	**10**	**1**	**12**

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Penerapan SNI oleh pelaku usaha saat ini belum banyak. Data tahun 2019, baru sebanyak 2.221 pelaku usaha yang melakukan sertikasi SNI pada produknya (data bangbeni.bsn.go.id) dari sekitar 94 juta pelaku usaha di Indonesia. Hal ini tentu masih ukuran yang relatif kecil. Disamping itu dari jumlah SNI yang ditetapkan juga baru 25 % yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Artinya upaya pemerintah untuk terus menggalakkan gerakan penerapan SNI di kalangan pelaku usaha harus secara terus menerus dan masif.

Pemerintah menyadari bahwa penerapan SNI merupakan suatu kebutuhan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan keberterimaan produk di pasar baik di tingkat nasional maupun global. Namun pemerintah melihat bahwa SNI ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam investasi, mengingat proses sertifikasi SNI yang membutuhkan waktu yang tidak cepat. Untuk itu, BSN terus meningkatkan infrastruktur mutu baik dari sisi penyediaan standar yang sesuai kebutuhan pelaku usaha, memfasilitasi penyediaan laboratorium dan lembaga sertifikasi untuk memudahkan pelaku usaha dalam sertifikasi SNI dan melakukan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha khususnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mempercepat proses sertifikasi SNI.

Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu meningkatkan penerapan SNI di kalangan pelaku usaha baik industri, organisasi dan usaha mikro kecil dan

menengah. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

TABEL I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN SUBDIREKTORAT FASILITASI PELAKU USAHA

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan dalam penerapan SNI meningkat	1.1. Biaya pendampingan penerapan SNI terbatas 1.2. Keterbatasan waktu SDM Pembina penerapan SNI 1.3. Ketidaktersediaan Lab atau Lspro yang sesuai dengan ruang lingkup	1.1.1. Sinergi dengan berbagai pihak untuk membantu pembiayaan sertifikasi 1.1.2. Pendekatan kepada lembaga sertifikasi untuk memberikan keringanan/fee untuk UMKM 1.2.1 Komitmen Pembina pelaku usaha 1.2.2 Memperbanyak pembina pelaku usaha khususnya di daerah 1.3 Kerjasama dengan Direktorat SPSPK dalam upaya penunjukan LPK untuk menambah ruang lingkup sesuai kebutuhan
2. Pembina UMKM di Indonesia cukup banyak tersebar dibeberapa wilayah	2.1 Masih sedikitnya pembina UMKM yang paham bagaimana mendampingi UMKM dalam menerapkan SNI	2.1 *Capacity building* pembina UMKM dalam penerapan SNI sinergi dengan institusi pembina UMKM 2.2 Membuat jejaring Fasilitator SNI
3. SNI yang berlaku sebanyak 10.629 SNI	3.1 Jumlah SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha baru 2.483 SNI 3.2. Beberapa pelaku usaha mempunyai keinginan sertifikasi SNI namun produknya belum ada SNI dan ketersediaan LPKnya	3.1 Perlu lebih gencar mensosialisasikan penerapan SNI kepada pelaku usaha 3.2 Sinergi dengan direktorat pengembangan standar dan Dit. SPSPK dalam penunjukan LSPro

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Unit organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan organisasi baru yang ditetapkan pada tahun 2019 yang sebelumnya secara tupoksi ada di Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan dan di Pusat Sistem Penerapan Standar. Untuk itu perencanaan strategis Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesessuaian masih relevan mengacu visi misi pada Rencana strategis 2015-2019 kedua unit eselon dua tersebut.

Rumusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

"Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar "

MISI

Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang Standardisasi dan penilaian kesesuaian

Sedangkan Visi dan Misi sesuai Renstra Pusat Sistem Penerapan Standar tahun 2015-2019 adalah **:**

VISI

"Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa"

MISI

1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian kesesuaian untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia;
2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia;
3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan pengaduan Penerapan Standar Nasional indonesia;

Untuk Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha mengacu ke Misi no 2 untuk di Pusat SPS yaitu Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia.

Kedua visi misi tersebut selaras dengan visi Badan Standardisasi Nasional yaitu :

"Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

untuk Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian relevan mendukung 2 misi BSN yaitu

1. Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Meningkatkan budaya standar di masyarakat.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Pusat Sistem Penerapan standar telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah sebagai berikut:

TUJUAN

a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian
b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain kesesuaian
c. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Untuk Subdirektorat Pelaku Usaha mengacu ke tujuan no 2 yaitu Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain kesesuaian.

Sedangkann untuk Pusat Sistem Penerapan Standar sesuai dengan Renstra 2015-2019 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI

Untuk Subdirektorat Pelaku Usaha relevan mengacu ke tujuan no 3 yaitu Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten.

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Pusat Sistem Penerapan Standar selaku Unit Teknis yang relevan dengan organisasi baru yaitu Direktorat Penguatan Penerapan Standar. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

adalah sebagai berikut **:**

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
2. Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi
3. Meningkatkan kemampuan LPK dalam mendukung penerapan
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

TABEL II.1 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGUATAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TAHUN 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk berstandar di pasar domestik Nasional yang didukurig SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi clan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5 %
	5. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1 %
	6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Nilai efektivitas Sistem Standardisasi clan Penilaian Kesesuaian	4,40
Internal Process Perspectives		
2. Meningkatkan penerapari SNI oleh pelaku usaha/organisasi	7. Persentase Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan	11 %
	6. Jumlah orgariisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14.000 Pelaku Usaha
	6. Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	80 Pelaku usaha
	7. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	150 Pelaku Usaha

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
	8. Jumlah SNI yang didiseminasikan	
3. Meningkatkan kemampuan LPK dalam mendukung penerapan	9. Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi KAN	10 LPK
Learning and Growth Perspectives		
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	10. Persentase realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	97 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran di mana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah dilakukan *cascading* Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II.2 PERJANJIAN KINERJA FASILITASI PELAKU USAHA TAHUN 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	1. Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14.000
	2. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	150
	3. Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	30
	4. Jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI	100
	5. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mampu menembus pasar ekspor	20
	6. Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha	15
	7. Jumlah Fasilitator Pembina Penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya	40

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1(satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	Pagu
3558	**Penguatan Penerapan Standar dan Penialaian Kesesuaian**	**11.821.577.000**
001	**Pendidikan, Pelatihan, dan Pemasyarakatan Standardisasi**	**7.821.577.000**
052	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dan Organisasi	1.639.692.000
057	Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi Standar	291.550.000
002	**Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Area Industri di Luar Pulau Jawa**	**3.000.000.000**
051	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	974.260.000
052	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	899.197.000
053	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	1.126.543.000
003	**Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Area Industri Yang Telah Eksisting**	**1.000.000.000**
051	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	436.544.000
052	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Bekasi - Cikarang	563.456.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.1 PENCAPAIAN KINERJA SUBDIREKTORAT FASILITASI PELAKU USAHA TAHUN 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	1.Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14.000	19.398	100 %
	2. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	150	190	100 %
	3.Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	30	34	100 %
	4.Jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI	100	118	100 %
	5.Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mampu menembus pasar ekspor	20	22	100 %
	6.Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha	15	12	80 %
	7.Jumlah Fasilitator Pembina Penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya	40	47	100 %
	Rata-rata capaian			**97 %**

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha untuk sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha hanya mempunyai 1 sasaran yaitu Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

TABEL III.2 CAPAIAN KINERJA SUB DIREKTORAT FASILITASI PELAKU USAHA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	**1.** Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14.000	19.398	100 %
	2. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	150	220	100 %
	3. Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	30	34	100 %
	4. Jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI	100	118	100 %
	5. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mampu menembus pasar ekspor	20	22	100 %
	6. Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha	15	12	80 %
	7. Jumlah Fasilitator Pembina Penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya	40	47	100 %
	Rata-rata capaian			**97 %**

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 97 % . Ada 6 indikator kinerja yang capainnya 100% yaitu :

1. Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI
3. Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI
4. Jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI
5. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mampu menembus pasar ekspor
6. Jumlah Fasilitator Pembina Penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya

Sedangkan indikator kinerja Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha hanya tercapai 80 % dimana panduan yang ditargetkan 15 panduan hanya berhasil tercapai 12 panduan. 3 (tiga) panduan yang belum berhasil dicapai adalah :

1. Panduan Pembinaan Penerapan SNI Permesinan
2. Panduan Pembinaan Penerapan SNI Alat Kesehatan
3. Panduan Pembinaan Penerapan SNI Tenun

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja tersebut.

Indikator Kinerja 1	Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Capaian indikator kinerja Jumlah organisasi yang menerapkan SNI untuk mengukur sasaran "Meningkatnya penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi" sebesar 100%. Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2019 sebanyak 19.398 organisasi. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 14.000. Capaian pada tahun 2019 ini lebih besar dibandingkan dengan capain indikator kinerja jumlah organisasi yang menerapkan SNI di tahun 2018, yang berjumlah 13.856 (Tabel III.3).

Data capaian indikator kinerja ini berasal dari organisasi yang terdaftar menjadi klien lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi mengeluarkan sertifikat kesesuaian kepada organisasi setelah melalui proses peniaian kesesuaian terhadap persyaratan standar. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh lembaga sertifikasi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan SNI semakin meningkat.

BSN melakukan pembinaan kepada organisasi/pelaku usaha dalam penerapan SNI melalui diseminasi, konsultasi, pembimbingan untuk meningkatkan penerapan SNI. Untuk mendukung penerapan SNI, BSN menyiapkan skema penilaian kesesuaian, melakukan pengembangan ruang lingkup sertifikasi, memfasilitasi penunjukan Lspro dan pendampingan penerapan SNI yang diharapkan mempercepat proses sertifikasi SNI.

TABEL III.3 : JUMLAH ORGANISASI PENERAP SNI SESUAI DENGAN LINGKUP SERTIFIKASI KAN

No	Organisasi/pelaku usaha	2016	2017	2018	2019
1	Organisasi/pelaku usaha penerap SNI Produk	2982	3082	1560	2221
2	Organisasi penerap sertifikasi Organik	355	319	288	316
3	Organisasi penerap sertifikasi Halal	-	-	3314	3270
4	Organisasi penerap sertifikasi SML	438	775	650	1944
5	Organisasi penerap sertifikasi Hutan Produksi Lestari	-	-	223	251
6	Organisasi penerap sertifikasi Ekolabel	7	7	9	8
7	Organisasi penerap sertifikasi Gas Rumah Kaca	-	-	5	5
8	Organisasi penerap sertifikasi SME	-	-	6	57
9	Organisasi penerap sertifikasi verifikasi Legalitasi Kayu	-	-	2257	2941
10	Organisasi penerap sertifikasi SMM	5990	5691	4961	5714
11	Organisasi penerap sertifikasi SM Keamanan Pangan	196	198	198	380
12	Organisasi penerap sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point	91	157	171	225
13	Organisasi penerap sertifikasi SM Keamanan Informasi	39	113	88	163
14	Organisasi penerap sertifikasi SMAK	10	11	17	33
15	Organisasi penerap sertifikasi SMAP	-	-	72	96
16	Organisasi penerap sertifikasi SM Keamanan Rantai Pasokan	-	-	-	2
17	Organisasi penerap sertifikasi Usaha Pariwisata	-	-	-	1801
18	Organisasi penerap sertifikasi SM Biorisiko Laboratorium	-	-	-	1
19	Organisasi penerap sertifikasi SM Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	71
	TOTAL	**10.108**	**10.353**	**13.819**	**19.398**

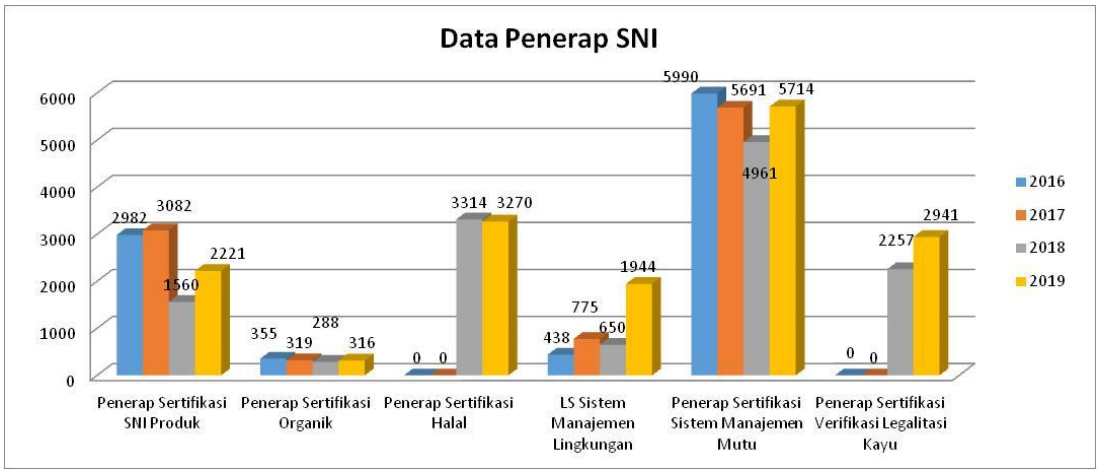

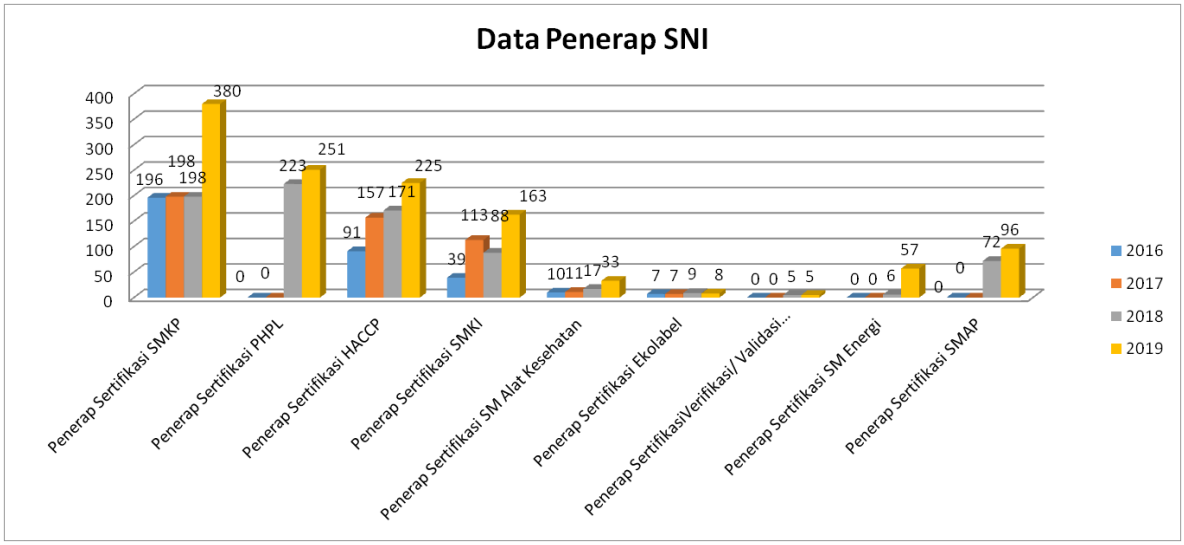

GAMBAR III.1 PERBANDINGAN JUMLAH ORGANISASI PENERAP SNI DARI TAHUN 2016-2019

Berdasarkan Gambar III.2 dibawah ini, terlihat bahwa sebagian besar penerap SNI dari lingkup masing-masing sertifikasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi SNI sudah menjadi kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing produknya.

Penerap SNI sistem manajemen mutu mengalami kenaikan sebesar 15 % dari tahun sebelumnya, penerap SNI sistem manajemen keamanan pangan mengalami kenaikan sebesar 91 %, sedangkan penerap sertifikasi SHACCP mengalami kenaikan sebesar 31 % demikian juga untuk penerap SNI sistem manajemen keamanan informasi 85 %, Penerap SNI produk mengalami kenaikan sebesar 42 %.

Hanya sertifikasi halal dan ekolabel yang mengalami penurunan dan sertifikasi gas rumah kaca tidak mengalami kenaikan.

Penambahan jumlah organisasi yang menerapkan SNI juga diperoleh dari klien lembaga sertifikasi yang pada tahun sebelumnya belum ada penerapnya, yaitu:

1. Organisasi penerap sertifikasi SM Keamanan Rantai Pasokan sebanyak 2 organisasi
2. Organisasi penerap sertifikasi SM Biorisiko Laboratorium sebanyak 1 organisasi
3. Organisasi penerap sertifikasi SM Keselamatan dan Kesehatan Kerja 71 sebanyak organisasi

Untuk penerap SNI Sistem Manajemen Alat Kesehatan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) belum secara signifikan mengalami peningkatan hanya 33 %. Kebijakan pemerintah terkait penerapan SNI SMAP belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh pelaku usaha baik dari private sector, BUMN maupun dari pemeerintah sendiri. Operasi tangkap tangan oleh KPK sendiri masih sering terjadi menimpa pejabat maupun legislatif di negeri ini. Untuk itu, di tahun 2020 BSN harus terus berkolaborasi untuk terus menggalakkan penerapan SMAP ini kepada stakeholder.

Indikator Kinerja 2	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI

Sesuai dengan amanah Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 53, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, dan/ atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Pembinaan penerapan SNI terhadap penerapan ini dilakukan secara multiyear, artinya pembinaan penerapan SNI yang dicapai di tahun 2019 bisa merupakan hasil proses pembinaan dari tahun sebelumnya. Pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha/organisasi diharapkan tidak berhenti sampai proses sertifikasi tapi juga dibantu dalam mempromosikan produk yang sudah berSNI ataupun mempromosikan organisasi yang sudah dapat SNI dengan melakukan branding organisasi tersebut juga BSN selaku intittusi pembina.

Capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI tercapai 100 % (sebanyak 220 pelaku usaha) dari target yang ditetapkan sebanyak 150 pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah pelaku UMKM, Industri dan juga organisasi yang dilakukan pembinaan penerapan SNI oleh BSN.

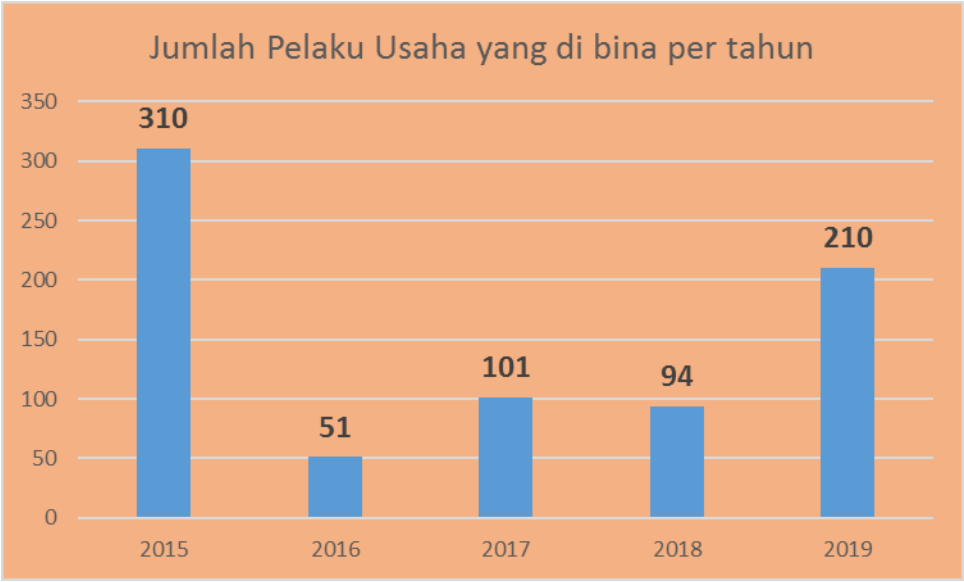

GAMBAR III.2 : JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN SNI PERTAHUNNYA

Pada tahun 2019, pembinaan penerapan SNI kepada pelaku UMKM sebanyak 180 UMKM, 21 industri besar dan 19 organisasi. Pencapaian ini lebih besar yang dilakukan di tahun 2018, dimana pelaku UMKM yang dibina dalam penerapan SNI hanya 150 dan organisasi yang dibina tahun 2018 hanya 8 organisasi/industri. Perbandingan jumlah pelaku UMKM yang dibina setiap tahunnya seperti dalam Gambar III.3

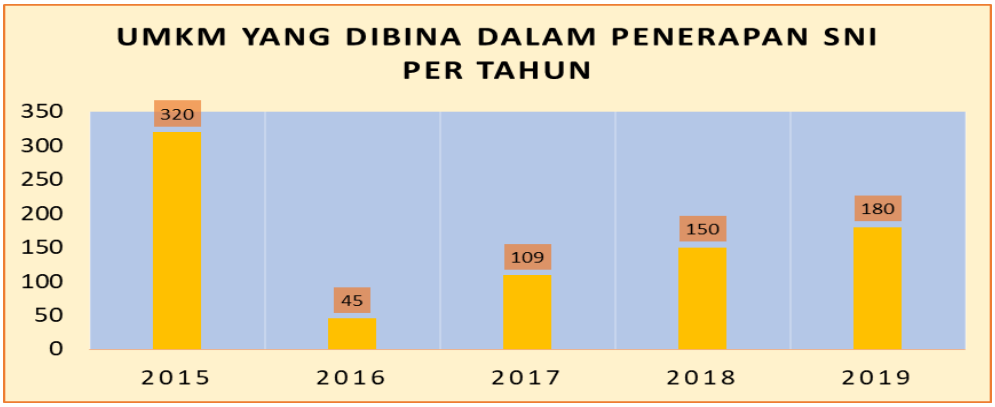

GAMBAR III.3 JUMLAH UMKM YANG DIBINA DALAM PENERAPAN SNI SETIAP TAHUN DARI 2015-2019

Dalam tahun yang berjalan, proses pembinaan kepada UMKM bisa merupakan kelanjutan dari pembinaan UMKM tahun sebelumnya. Sebagai contoh pembinaan 180 UMKM di tahun 2019 merupakan beberapa UMKM yang dibina tahun sebelumnya yang masih dalam tahapan proses pembinaan. Dengan demikian jumlah data UMKM secara kumulatif yang dilakukan pembinaan penerapan SNI sampai dengan tahun 2019 total adalah 707 UMKM seperti terlihat dalam Gambar III.4.

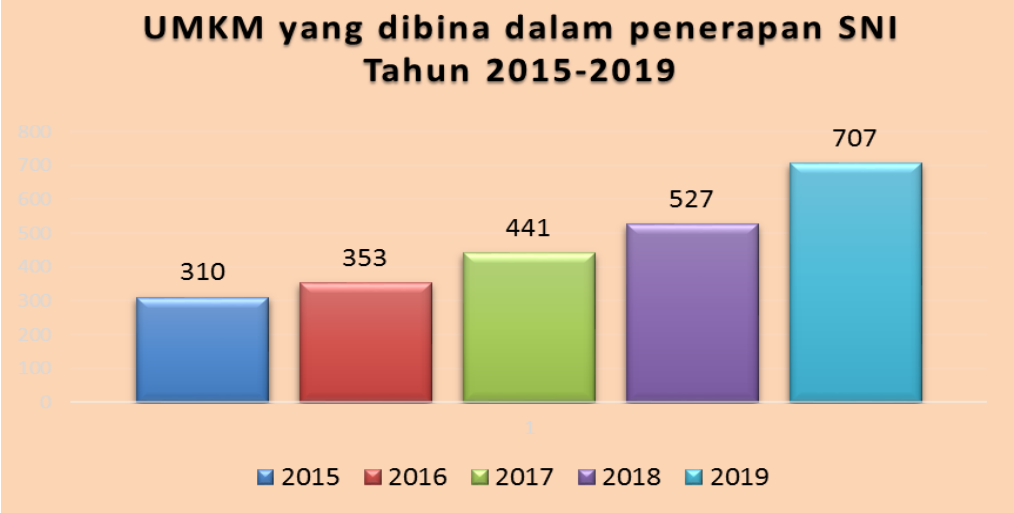

GAMBAR III.4 : DATA KOMULATIF UMKM YANG DBINA DALAM PENERAPAN SNI TAHUN 2015-2019

Untuk jangkauan propinsi pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha tahun 2019 mengalami penambahan, yang tahun 2018 hanya di 22 Provinsi tahun 2019 menjadi 24 propinsi (menambah 2 propinsi yaitu NAD dan Bali)

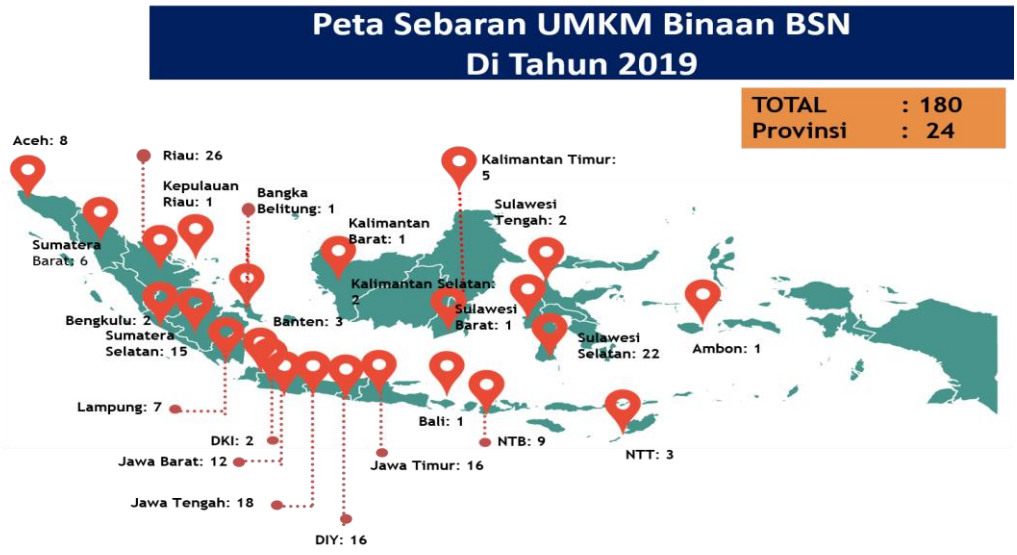

GAMBAR III.5 PETA SEBARAN PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN SNI SELAMA TAHUN 2019

Dari 180 UMKM yang dbina dalam penerapan SNI yang tersebar di 24 propinsi terdiri dari 90 jenis produk yang jenisnya sesuai dengan Gambar dibawah ini. Dari 90 jenis produk, 46 adalah produk pangan dan 44 adalah produk non pangan dengan jenis produk yang mendominasi adalah kopi (17%) dan Batik (9%)

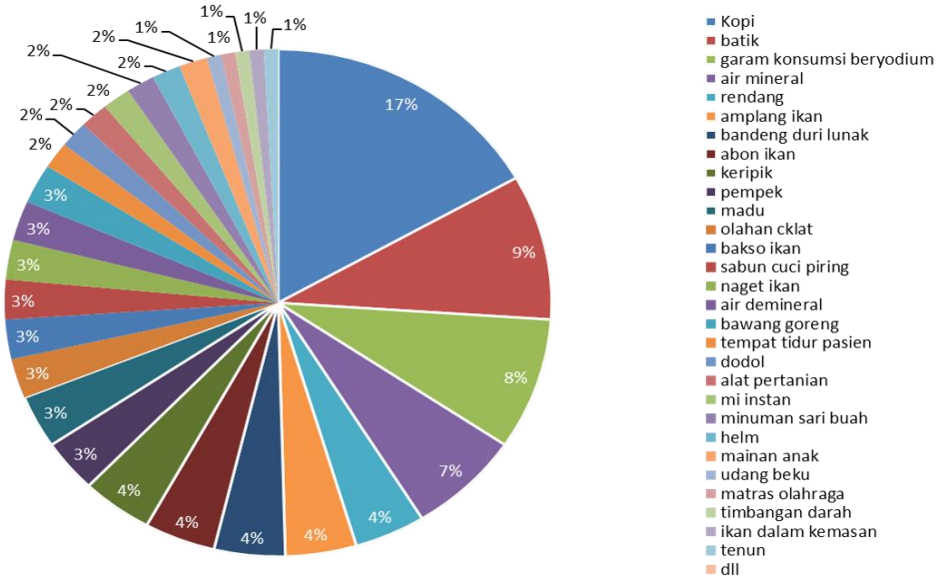

GAMBAR III.6 : JENIS PRODUK YANG DBINA DALAM PENERAPAN SNI DI TA 2019

Perbandingan pembinaan penerapan SNI kepada organisasi/industri setiap tahunnya seperti dalam gambar III.7

GAMBAR III.7 : JUMLAH ORGANISASI DAN INDUSTRI YANG DIBINA DALAM PENERAPAN SNI PER TAHUN

Pada tahun 2019 BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada organisasi sebanyak 19 organisasi dan 21 industri. Data ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 8 organisasi dan industri. Untuk fasilitasi kepada industri dan organisasi, BSN tidak memfasilitasi biaya sertifikasi seperti pada UMKM namun hanya pendampingan penyiapan sistem sampai siap untuk proses pendaftaran sertifikasi. SNI yang difokuskan untuk diterapkan kepada organisasi adalah :

1. **SNI ISO 37001: 2016**

   Inpres No 10 tahun 2016 yang memberikan amanah kepada BSN untuk mencegah KKN melalui penerapan SNI ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sejak tahun 2017 BSN melakukan pendampingan penerapan SNI SMAP kepada organisasi. Tahun 2019 sebanyak 8 organisasi yang didampingi dalam penerapan SNI pada organisasi di bawah ini

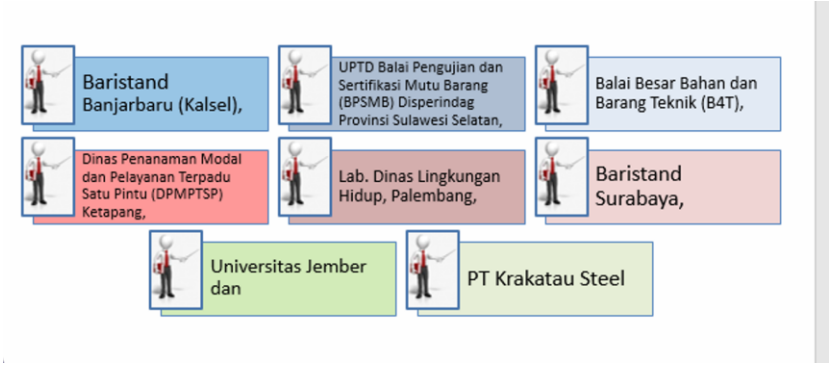

2. SNI ISO 9001: 2015

Pendampingan penerapan SNI kepada organisasi dilakukan di 6 organisasi, yaitu Pemerintah Kota Kupang (terdiri dari RSUD, Sekretariat Daerah, BKD dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil) dan Sekretariat daerah Madiun dan UNIBA. Pendampingan ini merupakan permintaah intittusi tersebut sebagai tindaklanjut MoU BSN dengan intittusi tersebut.

3. SNI 8152:2015

BSN melakukan pendampingan penerapan SNI Pasar rakyat di 5 pasar rakyat. Pendampingan penerapan SNI ada yang kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli ada yang dengan Dinas Pemerintah daerah.

Indikator Kinerja 3	Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI

Capaian jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI mencapai 100 persen, dengan capaian 34 role model dari 30 pelaku usaha yang ditargetkan. Pada tahun 2019, dari 180 UMKM yang dilakukan pembinaan penerapan SNI, 30 UMKM yang mendapat sertifikasi SNI dan HACCP. Sedangkan organisasi yang dibina sebanyak 19 organisasi, yang mendapatkan sertifikasi SNI berjumlah 4 orang. Jadi total pelaku usaha yang penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI berjumlah 34 pelaku usaha. Hal ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 30 role model penerap SNI.

Dibandingkan capaian tahun lalu, indikator kinerja ini mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 dari 35 UMKM yang ditargetkan sertifikasi hanya 25 yang sertifikasi SNI, sehingga Target capaian di 2018 sebanyak 50 role model penerap SNI tidak tercapai hanya 40 role model penerap SNI.

Beberapa UMKM yang tidak sertifikasi dikarenakan:

1. Sudah proses pendaftaran sertifikasi, tahap perbaikan
2. Baru tahap gap analysis dan penyiapan sistem, dikarenakan pembinaan baru dimulai pertengahan tahun
3. Masih proses penunjukan LSPro (sudah implementasi, namun belum ada LSPro)
4. Masih penataan infrastruktur (tindaklanjut dari hasil gap analysis)
5. Pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI

Berdasarkan gambar dibawah ini adalah jumlah role model penerap SNI setiap tahun yang khusus dari pelaku UMKM.

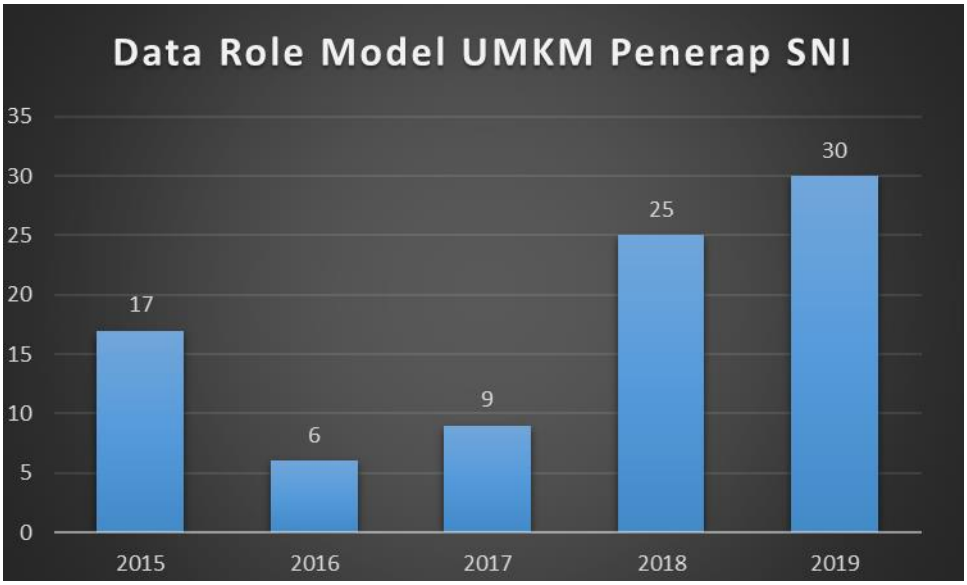

GAMBAR III.8 : DATA ROLE MODEL UMKM PENERAP SNI SETIAP TAHUN DARI 2015-2019

Berdasarkan Gambar tersebut capaian role model UMKM penerap SNI dengan dibandingkan dengan penyediaan anggaran setiap tahun, membuktikan bahwa dalam proses pembinaan penerapan SNI agar lebih banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikasi perlu berkolaborasi dengan kementeria atau instansi lain. Pada tahun 2019, beberapa UMKM yang dilakukan pembinaan penerapan SNI mendapatkan fasilitasi biaya sertifikasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM (sebanyak 3 UMKM), PT Sucofindo (sebanyak 1 UMKM) dan dari program CSR BUMN (sebanyak 2 UMKM). Total role model UMKM penerap SNI sampai saat ini sebanyak 87 UMKM seperti dalam Gambar III.9.

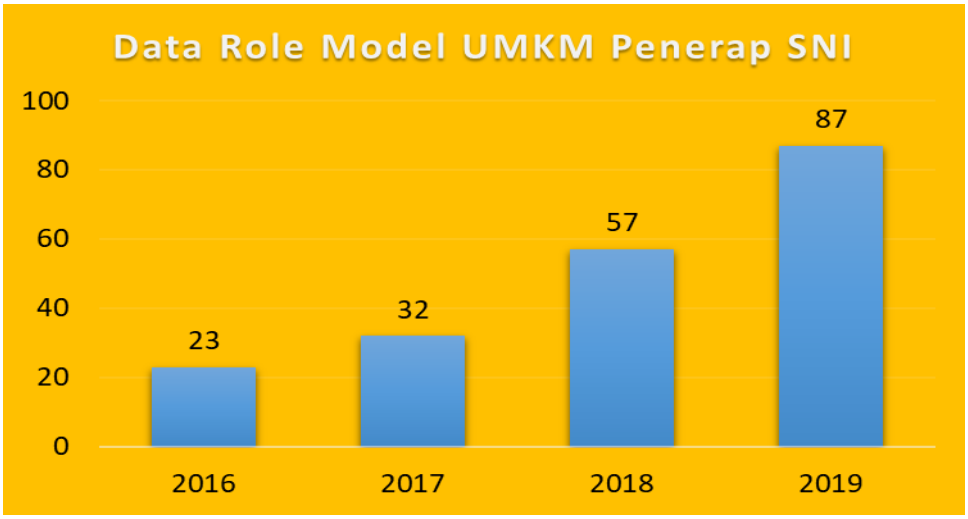

GAMBAR III.9 DATA ROLE MODEL UMKM PENERAP SNI SETIAP TAHUN

Sedangkan untuk organisasi yang menjadi role model penerap SNI dengan berhasil sertifikasi SNI di Tahun 2019 adalah :

1. Baristand Surabaya sertifikasi SNI ISO 37001
2. Pemkot Kupang sertifikasi SNI ISO 9001
3. Inspektorat Pemkab Serang sertifikasi SNI ISO
4. Universitas Jember integrasi sertifikasi SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001

Sedangkan sisanya dalam proses pembinaan penerapan SNI.

Indikator Kinerja 4	**Jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI**

BSN juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan penerapan SNI kepada produsen retail. Produk retail adalah produk yang pemasarannya melalui aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Contoh jenis produk retail yang menjadi target pembinaan penerapan SNI adalah produk kopi, olahan cokelat, batik, produk olahan ikan seperti naget, pempek, bakso ikan, pakaian bayi, mainan anak, dll. Pembimbingan penerapan SNI kepada produsen retail khususnya pelaku UMKM. Capaian jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI sebesar 100%, dari 100 pelaku usaha yang ditargetkan tercapak 118 pelaku usaha produk retail.

Indikator Kinerja 5	**Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mampu menembus pasar ekspor**

Pemerintah sedang fokus menggenjot nilai ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan strategis dijalankan, pemerintah telah menjalankan berbagai langkah strategis dalam upaya memacu nilai ekspor khususnya di sektor industri, termasuk meliputi penguatan sektor industri melalui program pembinaan agar lebih berdaya saing dan menyiapkan produk unggulan daerah siap ekspor. Pada tahun 2019, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor. Capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mempu menembus pasar ekspor adalah 100 %, capaian ini didapat 20 pelaku usaha yang dibina yang mempu tembus pasar ekspor. Beberapa pelaku usaha yang tembus ekspor seperti dalam gambar III.10.

GAMBAR III.10 BEBERAPA PRODUK DARI PELAKU USAHA BINAAN BSN YANG MENEMBUS EKSPOR

Pemasaran mayoritas UMKM Resep Ibu yang sudah sertifikasi HACCP ini ekspor ke Singapore dan Papua New Guinea dan proses penjajagan ekspor ke USA, sedangkan UMKM VALMAY MIE ekspor ke USA sudah proses sertifikasi HACCP.

Indikator Kinerja 6	Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha

Capaian indikator kinerja jumlah panduan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha untuk terwujudnya sebanyak 12 panduan dari target 15 panduan yang ditetapkan (80%). Panduan penerapan SNI dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerapkan SNI baik kepada pelaku UMKM maupun organisasi. 12 Jenis panduan penerapan SNI seperti dalam Gambar III.11

GAMBAR III.11 JUDUL PANDUAN PENERAPAN SNI

Ada 3 (tiga) panduan yang

1. Panduan Pembinaan Penerapan SNI Permesinan
2. Panduan Pembinaan Penerapan SNI Alat Kesehatan
3. Panduan Pembinaan Penerapan SNI Tenun

Panduan ini akan dilanjutkan penyusunannya pada tahun 2010

Indikator Kinerja 7	Jumlah Fasilitator Pembina Penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya

Capaian Indikator Kinerja jumlah fasilitator pembina penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya sebesar 100% dengan target 40 pembina tercapai 47 orang pembina. Untuk meningkatkan penerapan SNI kepada UMKM, BSN melakukan kolaborasi dengan instansi pembina UMKM agar dalam pembinaannya mengarahkan ke penerapan SNI. Untuk itu, BSN melakukan peningkatan kapasitas pembina UMKM mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuain, bagaimana mekanisme pembinaan penerapan SNI dan bersama-sama terjun langsung dalam proses pembinaan SNI. Dengan kegiatan ini diharapkan pembina UMKM di beberapa instansi mampu melakukan pembinaan penerapan SNI. 47 Fasilitator pembina penerapan SNI ini berasal dari perguruan tinggi, dinas, dan komunitas.

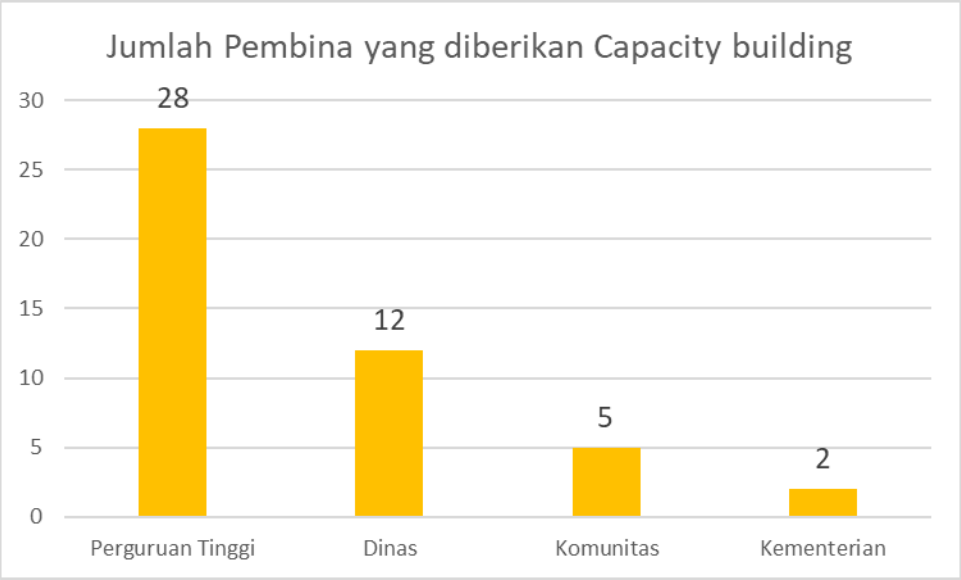

GAMBAR III.12 PEMBINA PENERAPAN SNI YANG DIBERIKAN CAPACITY BUILDING

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebesar Rp. 11.821.577.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.608.394.931 atau 98,20 %.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL III.4 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT PENGUATAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
3558	**Penguatan Penerapan Standar dan Penialaian Kesesuaian**	**11.821.577.000**	**11.608.394.931**	**98,19**
001	**Pendidikan, Pelatihan, dan Pemasyarakatan Standardisasi**	**7.821.577.000**	**7.718.566.949**	**98,68**
052	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dan Organisasi	1.639.692.000	1.589.944.333	96,97
057	Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi Standar	291.550.000	261.297.762	89,62
002	**Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Area Industri di Luar Pulau Jawa**	**3.000.000.000**	**2.929.338.144**	**97,64**
051	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	974.260.000	958.776.200	98,41
052	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	899.197.000	883.981.903	98,31
053	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	1.126.543.000	1.086.580.041	96,45
003	**Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Area Industri Yang Telah Eksisting**	**1.000.000.000**	**960.489.838**	**96,05**
051	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	436.544.000	432.794.844	99,14
052	Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Bekasi - Cikarang	563.456.000	527.694.994	93,65

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Subdirektorat Fasilitasi pelaku usaha Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Untuk terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi total ada 7 indikator kinerja dengan 6 indikator kinerja yang capainnya mencapai 100 % sedangkan 1 indikator kinerja yang tidak tercapai 100 % yaitu Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha.

Dengan capaian indikator kinerja tersebut, artinya Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk mendukung sasaran strategis, visi dan misi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang juga berperan secara strategis untuk mencapai visi Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yaitu Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian membuat lebih aman, nyaman dan sejahtera. Sedangkan Indikator Kinerja yang tidak tercapai akan ditindaklanjuti pada tahun selanjutnya yaitu penyusunan panduan penerapan SNI kepada pelaku usaha.

Laporan Kinerja Subdit Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Subdit Fasilitasi Pelaku Usaha Tahun 2019 di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal untuk meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi agar terwujudnya daya saing industri baik di tingkat nasional maupun global.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUBDIT FASILITASI PELAKU USAHA

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayati
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pelaku Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Suseno
Jabatan : Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Heru Suseno	Nur Hidayati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB DIREKTORAT FASILITASI PELAKU USAHA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi	1	Jumlah organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	14,000	organisasi
		2	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI	150	pelaku usaha
		3	Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI	30	pelaku usaha
		4	Jumlah pelaku usaha produk retail yang difasilitasi dalam penerapan SNI	100	pelaku usaha
		5	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI yang mampu menembus pasar ekspor	10	pelaku usaha
		6	Jumlah Panduan Pembinaan Penerapan SNI kepada pelaku usaha	15	Panduan
		7	Jumlah Fasilitator Pembina Penerapan SNI yang diberikan peningkatan kompetensinya	40	Fastor SNI

Jakarta, April 2019

Pihak Kedua

Heru Suseno

Pihak Pertama

Nur Hidayati